

**IMPLEMENTASI PERATURAN BUPATI NOMOR 51 TAHUN 2014
TENTANG PENDIRIAN TOKO MODERN SERTA PERLINDUNGAN
USAHA KECIL WARUNG/TOKO DAN PASAR TRADISIONAL OLEH
DINAS KOPERASI, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
KABUPATEN CIAMIS
(Studi Deskriptif di Wilayah Kecamatan Pamarican Kabupaten Ciamis)**

IIS NURMAYA

ABSTRAK

Berdasarkan hasil pengamatan yang dilakukan terdapat permasalahan Implementasi Peraturan Bupati Nomor 51 Tahun 2014 Tentang Pendirian Toko Modern Serta Perlindungan Usaha Kecil Warung/Toko dan Pasar Tradisional. Berdasarkan latar belakang di atas, yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 1) Bagaimana Implementasi Peraturan Bupati Nomor 51 Tahun 2014 Tentang Pendirian Toko Modern serta Perlindungan Usaha Kecil Warung/Toko dan Pasar Tradisional?; 2) Hambatan apa yang dihadapi dalam Implementasi Peraturan Bupati Nomor 51 Tahun 2014 Tentang Pendirian Toko Modern serta Perlindungan Usaha Kecil Warung/Toko dan Pasar Tradisional ?; 3) Upaya apa yang dilakukan untuk mengatasi hambatan Implementasi Peraturan Bupati Nomor 51 Tahun 2014 Tentang Pendirian Toko Modern serta Perlindungan Usaha Kecil Warung/Toko dan Pasar Tradisional?

Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif. Lamanya penelitian selama 10 bulan. Teknik pengumpulan data melalui studi kepustakaan, studi lapangan (observasi dan wawancara). Jumlah informan dalam penelitian ini adalah sebanyak 10 orang.

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa :1) Implementasi Peraturan Bupati Nomor 51 Tahun 2014 Tentang Pendirian Toko Modern serta Perlindungan Usaha Kecil Warung/Toko dan Pasar Tradisional belum terlaksana dengan baik sesuai pendapat Agustino, (2014 : 149) yang menyatakan terdapat 4 variabel yang dapat mempengaruhi implementasi kebijakan. 2) Hambatan-hambatan yang dihadapi antara lain : sulitnya melakukan komunikasi dengan pemilik toko, sumber daya manusia yang melaksanakan kebijakan serta dukungan anggaran yang masih kurang, disposisi/sikap pelaksana kebijakan masih kurang serta pemahaman petugas terkait SOP masih kurang. 3) Upaya-upaya yang dilakukan untuk mengatasi berbagai hambatan antara lain : dalam penyampaian informasi dilakukan melalui undangan secara resmi kepada pemilik tokoh dengan menjelaskan secara jelas rencana kegiatan yang akan dilaksanakan, meningkatkan ketersediaan sumber daya manusia yang memadai serta anggaran secara memadai, meningkatkan sikap petugas dalam mengimplementasikan kebijakan melalui pemberian reward dan funisment.

Kata Kunci : *Pengawasan Badan Permusyawaratan Desa, Pembangunan Desa*

A. PENDAHULUAN

Peran pemerintah sangat penting untuk membantu pedagang tradisional supaya dapat bersaing dengan toko modern sehingga keberadaannya tidak tersingkirkan. Hal ini seperti yang tertera pada Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007 Pasal 4 yang berisi:

Pusat perbelanjaan dan toko modern harus mempertimbangkan kondisi sosial ekonomi masyarakat, keberadaan pedagang tradisional, usaha kecil dan usaha menengah yang ada di wilayah yang bersangkutan, memperhatikan jarak antara toko modern dengan pasar tradisional yang ada sebelumnya, menyediakan area parkir paling sedikit seluas kebutuhan parkir 1 (satu) unit kendaraan roda empat untuk setiap 60 m² (enam puluh meter persegi) luas lantai penjualan pusat perbelanjaan dan atau toko modern yang menyediakan fasilitas yang menjamin pusat perbelanjaan dan toko modern yang bersih, sehat (*hygienis*) aman, tertib dan ruang publik yang nyaman.

Persaingan antara toko modern dengan pedagang tradisional sekarang semakin tidak terkendali dengan munculnya berbagai macam toko modern seperti Indomaret dan Alfamart yang telah menjamur dikarenakan masalah pemberian izin pendirian toko

modern serta perlindungan usaha kecil warung/toko dan pasar tradisional yang kurang sesuai dengan aturan pemerintah di wilayah Kecamatan Pamarican Kabupaten Ciamis.

Ketentuan jarak toko modern dengan pasar modern di tentukan dalam Perbup No 51 Tahun 2014 Pasal 10 ayat 1 ditegaskan tentang pengaturan jam operasional toko modern. Toko Modern hanya diperbolehkan beroperasi pada Hari Senin-Jum'at pada pukul 10.00-22.00 WIB sedangkan pada Hari Sabtu dan Minggu sampai pukul 10.00-23.00 WIB. Sedangkan Perbup No 51 Tahun 2014 Pasal 5 bahwa pembangunan atau pendirian toko modern harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. *Supermarket* dan *department store* berjarak minimal 1000 meter dari pasar tradisional yang terletak di pinggir jalan kolektor atau arteri;
- b. *Hypermartket* dan perkulakan berjarak minimal 1500 meter dari pasar tradisional yang terletak di pinggir jalan kolektor atau arteri.
- c. Jarak pendirian *minimarket* jaringan dengan pasar tradisional:
 - 1) Minimal berjarak 200 meter dari pasar tradisional yang berada di Ibu Kota Kabupaten;
 - 2) Minimal 250 meter dari pasar tradisional yang berada di Kecamatan;

- 3) Minimal 300 meter dari pasar tradisional yang berada di Desa.
- d. Jarak pendirian *minimarket* jaringan dengan keberadaan toko atau usaha sejenis:
 - 1) Minimal 100 meter dari toko sejenis, kecuali jika pemilik usaha yang lebih awal berdiri dan berada dibawah radius 100 meter memberikan persetujuan tertulis di atas materai;
 - 2) Minimal 150 meter dari usaha sejenis yang menjual komoditas sejenis kecuali jika pemilik usaha yang lebih awal berdiri dan berada di bawah radius 150 meter memberikan persetujuan tertulis di atas materai;

Masalah yang terjadi dilapangan menurut peneliti bahwasannya terdapat permasalahan Implementasi Peraturan Bupati Nomor 51 Tahun 2014 Tentang Pendirian Toko Modern Serta Perlindungan Usaha Kecil Warung/Toko dan Pasar Tradisional di Kabupaten Ciamis.

Berdasarkan hasil observasi yang penulis lakukan ditemukan permasalahan sebagai berikut:

- 1) Masih kurang konsistennya pemerintah dalam hal ini Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Ciamis dalam menegakan kebijakan tentang Pendirian Toko Modern Serta Perlindungan Usaha Kecil

Warung/Toko dan Pasar Tradisional di Kabupaten Ciamis hal ini nampak dari masih terdapatnya minimarket yang jaraknya tidak sesuai dengan ketentuan yang seharusnya. Contohnya toko indomart yang berada di Kecamatan Pamarican hanya berjarak 150 m dari pasar tradisional padahal seharusnya minimal jarak 250 m.

- 2) Masih kurang tegasnya pemerintah daerah terdapat minimarket yang tidak sesuai dengan ketentuan jam operasional toko modern padahal Toko Modern hanya diperbolehkan beroperasi pada Hari Senin-Jum'at pada pukul 10.00-22.00 WIB sedangkan pada Hari Sabtu dan Minggu sampai pukul 10.00-23.00 WIB. Contohnya toko Indomart yang berada di Kecamatan Pamarican beroperasi pada Hari Senin-Jum'at pada pukul 10.30-22.30 WIB sedangkan pada Hari Sabtu dan Minggu sampai pukul 10.30-23.30 WIB.

- 3) Kurang jelasnya informasi yang disampaikan Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Ciamis sehingga masih terdapat minimarket yang jarak pendiriannya terlalu dekat dengan minimarket yang menjual komoditas sejenis yang hanya berjarak kurang dari 100 meter sementara itu pemilik usaha tidak memberikan persetujuan tertulis di atas materai.

Munculnya toko modern atau minimarket tentunya akan mempengaruhi pedagang tradisional berada di sekitar, hal tersebut

disebabkan karena sebagian besar konsumen memilih berbelanja di minimarket yang menyebabkan pedagang tradisional mengalami penurunan dalam peningkatan penjualan yang terjadi sebelum berdirinya toko modern.

Berdasarkan uraian permasalahan diatas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut dan dituangkan dalam bentuk jurnal dengan judul **"Implementasi Peraturan Bupati Nomor 51 Tahun 2014 Tentang Pendirian Toko Modern Serta Perlindungan Usaha Kecil Waning/ Toko dan Pasar Tradisional oleh Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Ciamis"** (Studi Deskriptif di Wilayah Kecamatan Pamarican Kabupaten Ciamis)

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis merumuskan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut :

- a. Bagaimana Implementasi Peraturan Bupati Nomor 51 Tahun 2014 Tentang Pendirian Toko Modern serta Perlindungan Usaha Kecil Warung/Toko dan Pasar Tradisional oleh Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Ciamis?,
- b. Hambatan apa yang dihadapi dalam Implementasi Peraturan Bupati Nomor 51 Tahun 2014 Tentang Pendirian Toko Modern serta Perlindungan Usaha Kecil Warung/Toko dan Pasar Tradisional oleh Dinas Koperasi,

Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Ciamis ?;

- c. Upaya apa yang dilakukan untuk mengatasi hambatan Implementasi Peraturan Bupati Nomor 51 Tahun 2014 Tentang Pendirian Toko Modern serta Perlindungan Usaha Kecil Warung/Toko dan Pasar Tradisional oleh Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Ciamis ?

B. LANDASAN TEORITIS

Kebijakan merupakan suatu rencana, sikap, perbuatan, himpunan keputusan dan tindakan serta pengawasan yang terorganisir, untuk mencapai suatu tujuan tertentu melalui penggunaan sarana-sarana tertentu, meliputi suatu waktu tertentu dengan melalui tahap-tahap tertentu. Pelaku kebijakan dinamakan aktor-aktor, yaitu orang atau lembaga atau kelompok tertentu yang merupakan atau melaksanakan suatu kebijakan, untuk memecahkan suatu masalah yang memang perlu segera dipecahkan. Suatu kebijakan akan memiliki nilai penting dan bermanfaat apabila adanya implementasi atas kebijakan itu.

Winarno (2002:101), menjelaskan bahwa implementasi kebijakan adalah:

Implementasi kebijakan dipandang dalam pengertian luas merupakan alat administrasi hukum dimana berbagai aktor, organisasi, prosedur dan teknik yang bekerja bersama-sama untuk menjalankan kebijakan guna

meraih dampak atau tujuan yang diinginkan.

Kemudian Silalahi (2005:148) mengungkapkan pendapat yang lebih realistis mengenai pentingnya suatu implementasi kebijakan, yakni sebagai berikut:

Hal yang paling esensial dalam kebijakan negara adalah usaha untuk melaksanakan kebijakan negara. Jika suatu kebijakan telah diputuskan, kebijakan itu tidak berhasil dan terwujud bilamana tidak dilaksanakan. Pelaksanaan kebijakan merupakan rangkaian kegiatan setelah suatu kebijakan dirumuskan. Tanpa suatu pelaksanaan maka kebijakan yang telah dirumuskan akan sia-sia belaka. Oleh karena itu pelaksanaan kebijakan pemerintah merupakan kedudukan penting dalam kebijakan negara.

Berdasarkan kedua pendapat tersebut, dapat diuraikan bahwa implementasi kebijakan merupakan serangkaian rumusan kebijakan sebagai langkah awal dalam pengambilan keputusan. Sehingga dengan demikian maka kebijakan dapat dikatakan berhasil apabila dilaksanakan sesuai dengan yang telah dirumuskan atau ditetapkan sebelumnya.

Menurut Edward III (dalam Agustino, 2014 : 149) menyatakan terdapat 4 variabel yang dapat

mempengaruhi implementasi kebijakan yaitu :

1. Komunikasi
2. Sumber daya
3. Disposisi
4. Struktur birokrasi

C. METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini digunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Lamanya penelitian yang penulis lakukan kurang lebih 10 bulan. Sumber data dalam penelitian ini sebanyak 10 orang yang terdiri dari Kepala Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan 1 orang, Kabag Perdagangan 1 orang, Pegawai di bidang perdagangan 2 orang, Pegawai Kantor Pelayanan perijinan 2 orang, Pemilik toko modern 2 orang, Pemilik toko tradisional 2 orang

Teknik pengumpulan data melalui study pustaka (*literature study*) dan studi lapangan yang dilakukan dengan cara observasi dan wawancara (*interview*). Proses pengolahan data atau analisis hasil penelitian lapangan dilakukan dengan menggunakan tiga tahap, seperti berikut: 1) Tahap reduksi, yaitu bahwa proses analisis diarahkan untuk menelaah data (mendeskripsikan dan menginterpretasikan) data lapangan.; 2) Tahap Display, tahap ini merupakan periode interpretasi dan analisis; 3) Tahap Verifikasi, uji kebenaran terhadap kesimpulan yang telah diambil dengan mewujudkan situasi agar pihak-pihak yang meiliki informasi lengkap, akurat bersedia diminati keterangan lebih lanjut dan

sangat diharapkan agar memberikan data faktual.

D. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Implementasi Peraturan Bupati Nomor 51 Tahun 2014 Tentang Pendirian Toko Modern serta Perlindungan Usaha Kecil Warung/Toko dan Pasar Tradisional oleh Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Ciamis

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa implementasi Peraturan Bupati Nomor 51 Tahun 2014 Tentang Pendirian Toko Modern serta Perlindungan Usaha Kecil Warung/Toko dan Pasar Tradisional oleh Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Ciamis belum terlaksana dengan baik sesuai dengan 4 variabel yang dapat mempengaruhi implementasi kebijakan sebagai berikut :

1. Komunikasi

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa selama ini komunikasi yang dilakukan oleh Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Ciamis belum optimal hal ini dikarenakan sulitnya koordinasi dengan pihak terkait yang disebabkan oleh adanya pemahaman yang berbeda serta sulitnya melakukan sosialisasi kepada pemilik toko sehingga menyabkan isi kebijakan terkait prosedur dan mekanisme kebijakan

belum optimal selain itu petugas masih kurang memahami SOP sebagai pedoman dalam melaksanakan kebijakan.

Sementara itu menurut Widodo, (2011:97) menyatakan bahwa :

Komunikasi merupakan proses penyampaian informasi dari komunikator kepada komunikan. Sementara itu, komunikasi kebijakan berarti merupakan proses penyampaian informasi kebijakan dari pembuat kebijakan (*policy makers*) kepada pelaksana kebijakan (*policy implementors*). Selain itu informasi perlu disampaikan kepada pelaku kebijakan agar pelaku kebijakan dapat memahami apa yang menjadi isi, tujuan, arah, kelompok sasaran (*target group*) kebijakan, sehingga pelaku kebijakan dapat mempersiapkan hal-hal apa saja yang berhubungan dengan pelaksanaan kebijakan, agar proses implementasi kebijakan bisa berjalan dengan efektif serta sesuai dengan tujuan kebijakan itu sendiri.

Berdasarkan hasil penelitian dan teori tersebut menunjukkan bahwa selama ini komunikasi yang terjalin dengan pelaku kebijakan masih kurang optimal sehingga menyebabkan pelaku kebijakan kurang memahami apa yang menjadi isi, tujuan, arah, kelompok sasaran kebijakan sehingga hal ini menyebabkan kebijakan belum

terlaksana secara efektif sesuai dengan tujuan yang diharapkan.

2. Sumber daya

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa selama ini sumber daya yang ada di Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Ciamis belum memadai seperti ketersediaan sumber daya manusia yang masih kurang memadai, keahlian dan kemampuan dalam melaksanakan kebijakan masih kurang dan tingkat kualifikasi pendidikan pegawai kurang memadai serta kurangnya dukungan anggaran yang memadai untuk mengimplementasikan kebijakan.

Sementara itu menurut Widodo, (2011:98) menyatakan bahwa :

Bagaimanapun jelas dan konsistensinya ketentuan-ketentuan dan aturan-aturan serta bagaimanapun akuratnya penyampaian ketentuan-ketentuan atau aturan-aturan tersebut, jika para pelaksana kebijakan yang bertanggung jawab untuk melaksanakan kebijakan kurang mempunyai sumber-sumber daya untuk melaksanakan kebijakan secara efektif maka implementasi kebijakan tersebut tidak akan efektif. Sumber daya di sini berkaitan dengan segala sumber yang dapat digunakan untuk mendukung keberhasilan implementasi kebijakan. Sumber daya ini mencakup sumber daya manusia,

anggaran, fasilitas, informasi dan kewenangan

Berdasarkan hasil penelitian dan teori tersebut menunjukkan bahwa selama ini sumber daya yang ada pada Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Ciamis belum memadai sehingga mengakibatkan kebijakan belum terlaksana secara efektif sesuai dengan tujuan yang diharapkan. Hal ini terlihat dari kurangnya jumlah sumber daya pelaksana, kurangnya kemampuan dan keahlian pegawai serta dukungan anggaran yang masih kurang dalam mengimplementasikan kebijakan.

3. Disposisi pelaksana

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa selama ini disposisi pelaksana yang ada di Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Ciamis masih kurang optimal seperti kurangnya komitmen dari pelaksana berupa janji untuk bekerja keras sesuai aturan, kurangnya komitmen dari pelaksana untuk bertindak sesuai aturan.

Sementara itu menurut Wahab (2010:90), menjelaskan bahwa :

Disposisi adalah watak dan karakteristik yang dimiliki oleh implementor, seperti komitmen, kejujuran, sifat demokratis. Apabila implementor memiliki disposisi yang baik, maka dia akan menjalankan kebijakan dengan baik seperti apa yang diinginkan oleh pembuat kebijakan.

Berdasarkan hasil penelitian dan teori tersebut menunjukkan bahwa selama ini disposisi pelaksana kebijakan pada Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Ciamis belum memadai sehingga mengakibatkan kebijakan belum terlaksana secara efektif sesuai dengan tujuan yang diharapkan. Hal ini terlihat dari komitmen implementor dalam melaksanakan kebijakan masih kurang, kedisiplinan pegawai masih kurang serta kurangnya motivasi dalam mengimplementasikan kebijakan dan kurangnya kesungguhan implementor dalam mengimplementasikan kebijakan yang menyebabkan kebijakan belum terlaksana dengan baik sesuai harapan.

4. Struktur birokrasi

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa struktur organisasi yang ada di Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Ciamis masih kurang optimal hal ini disebabkan oleh kurangnya kesesuaian kemampuan pegawai dengan penempatan pegawai yang menyebabkan keahlian pegawai kurang dimanfaatkan. Permasalahan tersebut terjadi karena kurangnya memperhatikan aspek kemampuan dan keahlian pegawai dalam penyusunan organisasi dan penempatan pegawai dalam suatu pekerjaan.

Sementara itu menurut Widodo (2011:99), menjelaskan bahwa :

Struktur organisasi memiliki pengaruh yang signifikan terhadap implementasi kebijakan. Aspek struktur organisasi ini melingkupi dua

hal yaitu mekanisme dan struktur birokrasi itu sendiri. Aspek pertama adalah mekanisme, dalam implementasi kebijakan biasanya sudah dibuat *standart operation procedur* (SOP). SOP menjadi pedoman bagi setiap implementator dalam bertindak agar dalam pelaksanaan kebijakan tidak melenceng dari tujuan dan sasaran kebijakan. Aspek kedua adalah struktur birokrasi, struktur birokrasi yang terlalu panjang dan terfragmentasi akan cenderung melemahkan pengawasan dan menyebabkan prosedur birokrasi yang rumit dan kompleks yang selanjutnya akan menyebabkan aktivitas organisasi menjadi tidak fleksibel.

Berdasarkan hasil penelitian dan teori tersebut menunjukkan bahwa selama ini struktur organisasi pada Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Ciamis kurang memperhatikan kemampuan dan keahlian pegawai dalam bekerja sehingga menyebabkan kurang optimalnya implementasi kebijakan hal ini dikarenakan dalam penempatan kerja atau pembagian pegawai kurang memperhatikan kesesuaian pengalaman kerja maupun tingkat pendidikan pegawai.

2. Hambatan-hambatan dalam Implementasi Peraturan Bupati Nomor 51 Tahun 2014 Tentang Pendirian Toko

**Modern serta Perlindungan
Usaha Kecil Warung/Toko
dan Pasar Tradisional oleh
Dinas Koperasi,
Perindustrian dan
Perdagangan Kabupaten
Ciamis**

Berdasarkan hasil wawancara dengan pegawai mengenai hambatan yang dihadapi dalam Implementasi Peraturan Bupati Nomor 51 Tahun 2014 Tentang Pendirian Toko Modern serta Perlindungan Usaha Kecil Warung/Toko dan Pasar Tradisional oleh Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Ciamis terdapat hambatan-hambatan yang dihadapi adalah sebagai berikut :

1. Komunikasi

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa adanya hambatan dalam melaksanakan komunikasi yang dilakukan oleh Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Ciamis hal ini dikarenakan sulitnya melakukan sosialisasi kepada pemilik toko sehingga menyebabkan isi kebijakan terkait prosedur dan mekanisme kebijakan belum optimal

Sementara itu menurut Muhammad, (2012:110) menyatakan bahwa :

Adanya hambatan dalam proses komunikasi dengan masyarakat yang disebabkan oleh hambatan yang timbul dari ketidak jelasan informasi yang akan disampaikan serta pemahaman yang sedikit mengenai bahasa dan istilah-istilah asing yang

digunakan dalam informasi atau pesan.

Berdasarkan hasil penelitian dan teori tersebut menunjukkan bahwa selama ini komunikasi yang dilakukan mengalami hambatan disebabkan adanya ketidakjelasan informasi yang disampaikan serta pemahaman yang sedikit menyebabkan informasi yang disampaikan tidak dapat dipahami oleh masyarakat selain itu masyarakat cenderung memiliki persepsi negative sehingga sulit memberikan informasi kepada masyarakat yang sudah memiliki persepsi yang negative.

2. Sumber daya

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa selama ini hambatan dalam mengimplementasikan kebijakan oleh Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Ciamis dikarenakan sumber daya manusia yang belum memadai seperti ketersediaan sumber daya manusia yang masih kurang memadai, keahlian dan kemampuan dalam melaksanakan kebijakan masih kurang dan tingkat kualifikasi pendidikan pegawai kurang memadai serta kurangnya dukungan anggaran yang memadai untuk mengimplementasikan kebijakan.

Sementara itu menurut Agustiono, (2006:158) menyatakan bahwa :

Sumber daya utama dalam implementasi kebijakan adalah staf atau pegawai (*street-level bureaucrats*). Kegagalan yang sering terjadi dalam implementasi kebijakan, salah-satunya disebabkan oleh

staf/pegawai yang tidak cukup memadai, mencukupi, ataupun tidak kompeten dalam bidangnya. Penambahan jumlah staf dan *implementor* saja tidak cukup menyelesaikan persoalan implementasi kebijakan, tetapi diperlukan sebuah kecukupan staf dengan keahlian dan kemampuan yang diperlukan (kompeten dan kapabel) dalam mengimplementasikan kebijakan.

Berdasarkan hasil penelitian dan teori tersebut menunjukkan bahwa selama ini adanya hambatan dalam mengimplementasikan kebijakan disebabkan oleh sumber daya yang ada pada Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Ciamis belum memadai sehingga mengakibatkan kebijakan belum terlaksana secara efektif sesuai dengan tujuan yang diharapkan. Hal ini terlihat dari kurangnya jumlah sumber daya pelaksana, kurangnya kemampuan dan keahlian pegawai serta dukungan anggaran yang masih kurang dalam mengimplementasikan kebijakan.

3. Disposisi pelaksana

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa adanya hambatan terkait disposisi pelaksana yang ada di Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Ciamis sehingga implementasi masih kurang optimal hal ini dikarenakan adanya hambatan kurangnya komitmen dari pelaksana berupa janji untuk bekerja keras sesuai aturan, kurangnya

komitmen dari pelaksana untuk bertindak sesuai aturan.

Sementara itu menurut Agustinus (2006:162) menyatakan bahwa :

Sikap penerimaan atau penolakan dari agen pelaksana kebijakan sangat mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan implementasi kebijakan publik. Hal ini sangat mungkin terjadi karena kebijakan yang dilaksanakan bukanlah hasil formulasi warga setempat yang mengenal betul permasalahan dan persoalan yang mereka rasakan. Tetapi kebijakan publik biasanya bersifat *top down* yang sangat mungkin para pengambil keputusan tidak mengetahui bahkan tak mampu menyentuh kebutuhan, keinginan atau permasalahan yang harus diselesaikan.

Berdasarkan hasil penelitian dan teori tersebut menunjukkan bahwa selama ini hambatan yang sering terjadi pada disposisi pelaksana kebijakan pada Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Ciamis disebabkan oleh komitmen *implementor* dalam melaksanakan kebijakan masih kurang, kedisiplinan pegawai masih kurang serta kurangnya motivasi dalam mengimplementasikan kebijakan dan kurangnya kesungguhan *implementor* dalam mengimplementasikan kebijakan yang menyebabkan kebijakan belum terlaksana dengan baik sesuai harapan.

4. Struktur birokrasi

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa hambatan struktur organisasi yang ada di Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Ciamis disebabkan oleh kurangnya kesesuaian kemampuan pegawai dengan penempatan pegawai yang menyebabkan keahlian pegawai kurang dimanfaatkan. Permasalahan tersebut terjadi karena kurangnya memperhatikan aspek kemampuan dan keahlian pegawai dalam penyusunan organisasi dan penempatan pegawai dalam suatu pekerjaan serta pemahaman yang kurang terkait SOP.

Sementara itu menurut Winarno (2005:152) menjelaskan bahwa:

SOP sangat mungkin dapat menjadi kendala bagi implementasi kebijakan baru yang membutuhkan cara-cara kerja baru atau tipe-tipe personil baru untuk melaksanakan kebijakan-kebijakan. Dengan begitu, semakin besar kebijakan membutuhkan perubahan dalam cara-cara yang lazim dalam suatu organisasi, semakin besar pula probabilitas SOP menghambat implementasi.

Berdasarkan hasil penelitian dan teori tersebut menunjukkan bahwa selama ini yang menjadi hambatan struktur organisasi pada Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Ciamis yaitu adanya pemahaman yang kurang terhadap SOP sehingga hasil pekerjaan belum sesuai dengan ketentuan.

3. Upaya-upaya yang dilakukan dalam mengatasi hambatan Implementasi Peraturan Bupati Nomor 51 Tahun 2014 Tentang Pendirian Toko Modern serta Perlindungan Usaha Kecil Warung/Toko dan Pasar Tradisional oleh Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Ciamis

Berdasarkan hasil wawancara dengan pegawai mengenai upaya mengatasi hambatan dalam Implementasi Peraturan Bupati Nomor 51 Tahun 2014 Tentang Pendirian Toko Modern serta Perlindungan Usaha Kecil Warung/Toko dan Pasar Tradisional oleh Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Ciamis terdapat hambatan-hambatan yang dihadapi. Berdasarkan uraian-uraian hasil penelitian tiap indikator tersebut di atas, maka dapat disajikan hasil pembahasan terkait upaya-upaya yang dilakukan antara lain :

1. Komunikasi

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa selama ini dalam melakukan komunikasi, Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Ciamis melakukan berbagai upaya yang intinya dilakukan supaya pemahaman petugas meningkat seperti menyampaikan SOP kepada petugas yang terkait sehingga pelaksanaan kebijakan sesuai dengan yang diharapkan.

Sementara itu menurut Subarsono (2010:67) menyatakan bahwa :

Untuk tercapainya kegiatan komunikasi dalam implementasi kebijakan adanya tiga hal, yaitu; (1) penyaluran (transmisi) yang baik akan menghasilkan implementasi yang baik pula (kejelasan); (2) adanya kejelasan yang diterima oleh pelaksana kebijakan sehingga tidak membingungkan dalam pelaksanaan kebijakan, dan (3) adanya konsistensi yang diberikan dalam pelaksanaan kebijakan. Jika yang dikomunikasikan berubah-ubah akan membingungkan dalam pelaksanaan kebijakan yang bersangkutan.

Berdasarkan hasil penelitian dan teori tersebut menunjukkan bahwa untuk memperlancar kegiatan komunikasi sebaiknya petugas melakukan upaya dalam melakukan komunikasi dengan masyarakat seperti menyalurkan informasi secara jelas sehingga dapat dipahami oleh masyarakat dan konsisten dalam melaksanakan kebijakan sehingga dapat meminimalisir persepsi negative dari masyarakat.

2. Sumber daya

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa dilakukan berbagai upaya dalam meningkatkan ketersediaan sumber daya yang ada di Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Ciamis seperti

meningkatkan pelatihan bagi petugas supaya petugas yang ada dapat melaksanakan kebijakan secara optimal.

Sementara itu menurut Subarsono (2010:71) menyatakan sebagai berikut :

Dalam implementasi kebijakan harus ditunjang oleh sumberdaya baik sumberdaya manusia, materi dan metoda. Sasaran, tujuan dan isi kebijakan walaupun sudah dikomunikasikan secara jelas dan konsisten, tetapi apabila implementor kekurangan sumberdaya untuk melaksanakan, implementasi tidak akan berjalan efektif dan efisien. Tanpa sumberdaya, kebijakan hanya tinggal di kertas menjadi dokumen saja tidak diwujudkan untuk memberikan pemecahan masalah yang ada di masyarakat dan upaya memberikan pelayan pada masyarakat.

Berdasarkan hasil penelitian dan teori tersebut menunjukkan bahwa Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Ciamis telah berupaya menyediakan sumber daya dalam mengimplementasikan kebijakan seperti meningkatkan ketersediaan sumber daya manusia yang memadai serta anggaran secara memadai sehingga petugas dapat mengimplementasikan kebijakan secara efektif.

3. Disposisi pelaksana

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Ciamis melakukan upaya supaya petugas memiliki sikap dan tanggungjawab dalam menyelesaikan setiap pekerjaan yang diberikan dengan baik.

Sementara itu menurut Subarsono (2010:78), menjelaskan bahwa :

Suatu disposisi dalam implementasi dan karakteristik, sikap yang dimiliki oleh implementor kebijakan, seperti komitmen, kejujuran, komunikatif, cerdas dan sifat demokratis. Implementor baik harus memiliki disposisi yang baik, maka dia akan dapat menjalankan kebijakan dengan baik seperti apa yang diinginkan dan ditetapkan oleh pembuat kebijakan..

Berdasarkan hasil penelitian dan teori tersebut menunjukkan bahwa dilakukannya upaya oleh Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Ciamis dalam meningkatkan sikap petugas dalam mengimplementasikan kebijakan sehingga petugas memiliki tanggungjawab dalam bekerja hal ini dilakukan melalui pemberian reward dan funisment.

4. Struktur birokrasi

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Ciamis berupaya supaya struktur organisasi

dapat efektif untuk melaksanakan kebijakan yang telah direncanakan hal ini dilakukan melalui pemberian arahan dan pembinaan sehingga pemahaman terhadap SOP meningkat.

Sementara itu menurut Subarsono (2010:87), menjelaskan bahwa :

Dalam implementasi kebijakan, struktur organisasi mempunyai peranan yang penting. Salah satu dari aspek struktur organisasi adalah adanya prosedur operasi yang standar (standard operating procedures/SOP). Fungsi dari SOP menjadi pedoman bagi setiap implementor dalam bertindak. Struktur organisasi yang terlalu panjang akan cenderung melemahkan pengawasan dan menimbulkan red-tape, yakni birokrasi yang rumit dan kompleks

Berdasarkan hasil penelitian dan teori tersebut menunjukkan bahwa Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Ciamis berupaya mengoptimalkan struktur organisasi yang ada dengan meningkatkan pemahaman petugas terkait SOP yang telah ditetapkan seperti melakukan pengarahan dan pembagian tugas secara jelas dan terukur supaya kebijakan dapat diimplementasikan dengan baik.

E. KESIMPULAN DAN SARAN

1. Kesimpulan

- a. Implementasi Peraturan Bupati Nomor 51 Tahun 2014 Tentang Pendirian Toko Modern serta Perlindungan Usaha Kecil Warung / Toko dan Pasar Tradisional oleh Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Ciamis belum terlaksana dengan baik sesuai pendapat Agustino, (2014 : 149) yang menyatakan terdapat 4 variabel yang dapat mempengaruhi implementasi kebijakan. Hal ini ditunjukkan dengan hasil wawancara bahwa adanya beberapa indikator yang belum terlaksana dengan baik seperti komunikasi yang dilaksanakan belum optimal, sumberdaya yang ada belum memadai, disposisi / sikap pelaksana yang kurang memiliki komitmen serta pemahaman petugas terkait SOP sesuai dengan struktur organisasi belum optimal. Berdasarkan hasil observasi dapat diketahui bahwa selama ini Implementasi Peraturan Bupati Nomor 51 Tahun 2014 Tentang Pendirian Toko Modern serta Perlindungan Usaha Kecil Warung / Toko dan Pasar Tradisional oleh Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Ciamis sudah dilaksanakan sesuai dengan variable pendukung implementasi kebijakan seperti variable komunikasi, sumberdaya, sikap pelaksana dan struktur organisasi, namun pelaksanaannya belum optimal.
- b. Hambatan-hambatan yang dihadapi dalam implementasi Peraturan Bupati Nomor 51 Tahun 2014 Tentang Pendirian Toko Modern serta Perlindungan Usaha Kecil Warung / Toko dan Pasar Tradisional oleh Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Ciamis bahwa terdapat beberapa hambatan antara lain yaitu : sulitnya melakukan komunikasi dengan pemilik took sehingga proses sosialisasi kurang terlaksana dengan baik, sumber daya manusia yang melaksanakan kebijakan masih kurang serta dukungan anggaran yang ada masih kurang, pada aspek disposisi / sikap pelaksana kebijakan masih kurang memiliki komitmen dalam melaksanakan kebijakan serta pemahaman petugas terkait SOP masih kurang sehingga implementasi kebijakan kurang sesuai dengan struktur organisasi yang telah ditetapkan.
- c. Upaya-upaya yang dilakukan untuk mengatasi berbagai hambatan dalam implementasi Peraturan Bupati Nomor 51

Tahun 2014 Tentang Pendirian Toko Modern serta Perlindungan Usaha Kecil Warung / Toko dan Pasar Tradisional oleh Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Ciamis antara lain : dalam penyampaian informasi dilakukan melalui undangan secara resmi kepada pemilik tokoh dengan menjelaskan secara jelas rencana kegiatan yang akan dilaksanakan, meningkatkan ketersediaan sumber daya manusia yang memadai serta anggaran secara memadai sehingga petugas dapat mengimplementasikan kebijakan secara efektif, meningkatkan sikap petugas dalam mengimplementasikan kebijakan sehingga petugas memiliki tanggung jawab dalam bekerja hal ini dilakukan melalui pemberian reward dan funisment serta meningkatkan pemahaman petugas terkait SOP yang telah ditetapkan seperti melakukan pengarahan dan pembagian tugas secara jelas dan terukur supaya kebijakan dapat diimplementasikan dengan baik.

2. Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka saran yang dapat penulis kemukakan yaitu:

- a. Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan, sebaiknya

dalam implementasi Peraturan Bupati Nomor 51 Tahun 2014 Tentang Pendirian Toko Modern serta Perlindungan Usaha Kecil Warung / Toko dan Pasar Tradisional melakukan komunikasi dengan pemilik took secara intensif sehingga pemahaman pemilik took meningkat, selain itu sebaiknya dilakukan peningkatan kemampuan petugas melalui kegiatan pelatihan dan memberikan pengarahan secara rutin kepada petugas pelaksana supaya SOP dapat dipahami dan dilaksanakan dengan baik.

- b. Sebaiknya Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan dapat mengatasi berbagai hambatan dalam mengimplementasikan kebijakan melalui secara rutin melakukan evaluasi sehingga permasalahan-permasalahan dapat secepatnya diselesaikan serta secara rutin meningkatkan kemampuan sumber daya manusia dalam melaksanakan kebijakan melalui kegiatan pelatihan.
- c. Sebaiknya Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan lebih berupaya dalam meningkatkan dukungan dari dalam organisasi maupun instansi lain yang berkaitan dengan

pelaksanaan pelayanannya seperti adanya dukungan sumber daya manusia, fasilitas, kemampuan sehingga implementasi Peraturan Bupati Nomor 51 Tahun 2014 Tentang Pendirian Toko Modern serta Perlindungan Usaha Kecil Warung / Toko dan Pasar Tradisional dapat diterapkan sepenuhnya, sehingga masyarakat dapat lebih mengetahui informasi dari pelaksana kebijakan tentang bagaimana aturan-aturan dan tata cara pelaksanaan kebijakan tersebut terutama di wilayah Kecamatan Pamarican Kabupaten Ciamis.

F. DAFTAR PUSTAKA

- _____, 2014. *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta.
- Akriyanto, Rendy. 2012. *Pengaruh Independensi, Gaya Kepemimpinan, Komitmen Organisasi dan Pemahaman Good Governanve Terhadap Kinerja Auditor (Studi Empiris Pada Auditor di KAP Wilayah Surakarta dan Yogyakarta)*. Skripsi FEB Universitas Muhammadiyah Surakarta.
- Basrowi & Suwandi. 2008. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Grindle, Merilee S., (ed), 1980, *Politics and Apolicy Implementation in the Third World*, new jersey: Princetown University Press.
- Abdul Wahab Shilichin, 2012, *Analisis Kebijakan*, Jakarta: Bumi Aksara.
- _____, 1990. *Pengantar Analisis Kebijaksanaan Negara*. Rineka Cipta. Jakarta.
- Abdul, Solihin. 2008. *Pengantar Anasllisis Kebijakan Publik*, Malang : Penerbit. Universitas Muhammadiyah
- Hadari, Nawawi. 2005. *Metode Penelitian Bidang Sosial*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Islamy, M. Irfan, 2002, *Prinsip-Prinsip Perumusan Kebijakan Negara*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Istijanto. 2008. *Riset Sumber Daya Manusia*. Edisi ketiga. Jakarta : PT. Gramedia Pustaka.
- Agustino, Leo. 2008. *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta.
- Lineberry, Robert dan Ira Sharkansky. 1978. *Urban Politics and Public Policy*. New York: Harper and Row.

- Mulyana, Deddy. 2003. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung : PT Remaja Rosdakarya
- Sondang P, Siagian. 1993. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Sugiyono. 2006. “*Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*”. Bandung: Alfabeta
- Surakhmad, Winarno. 2004. *Pengantar Penelitian Ilmiah Dasar Metode Teknik*. Bandung: Tarsito
- Moleong, Lexy J. 2006. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Penerbit PT Remaja Rosdakarya Offset, Bandung
- Surbakti, Ramlan, 1992, *Memahami Ilmu Politik*, Gramedia Widya Sarana, Jakarta
- Wahab, SA., 2001, *Analisis Kebijaksanaan, dari Formulasi ke Implementasi Kebijaksanaan Negara, Edisi Kedua*, Penerbit Bumi Aksara, Jakarta
- Wibawa, Samudra, 1994. *Evaluasi Kebijakan Publik*. Jakarta : Raja Grafindo Persada.
- Winarno, Budi, 2002, *Teori Dan Proses Kebijakan Publik*, Yogyakarta: Madia Pressindo.
- Pasal 12 Peraturan Bupati Ciamis Nomor 51 Tahun 2014 tentang pendirian toko modern serta Perlindungan Usaha Kecil Warung/Toko dan Pasar Tradisional
- Pasal 17 Peraturan Bupati Ciamis Nomor 51 Tahun 2014 tentang pendirian toko modern serta Perlindungan Usaha Kecil Warung/Toko dan Pasar Tradisional
- Peraturan Bupati Nomor 51 Tahun 2014 Tentang Pendirian Toko Modern
- Peraturan Presiden nomor 112 tahun 2007 tentang penataan dan pembinaan pasar tradisional
- Perbup No 51 Tahun 2014 Pasal 10 ayat 1 ditegaskan tentang pengaturan jam operasional